



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 1, April 2021

PENGARUH PENERAPAN RULE OF LAW, CONSENSUS ORIENTATION, DAN EQUALITY TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DESA TOTOKATON KECAMATAN PUNGGUR)

Tri Suci Rahayu¹, Nedi Hendri², Angga Kurniawan³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung Indonesia

rahayu.trisuci95@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of rule of law (1), consensus orientation (2), and equality (3) on community welfare. This study used a quantitative approach, the population of this study was 151 respondents. The sampling technique in this study was probability sampling using simple proportional random sampling with the Slovin formula, so as to obtain a sample of 60 respondents. The data in this study used SPSS version 20 with multiple linear regression analysis testing. The results of this study indicated that the rule of law had a significant effect on people's welfare, while consensus orientation and equality did not have a significant effect on people's welfare.

Keywords: Rule Of Law; Consensus Orientation; Equality; Community Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *rule of law* (1), *consensus orientation* (2), dan *equality* (3) Terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian ini ialah sebanyak 151 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan *probability sampling* dengan menggunakan *proportional simple random sampling* dengan rumus Slovin, sehingga memperoleh sampel sebanyak 60 responden. Data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 20 dengan pengujian analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rule of law* berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan *consensus orientation* dan *equality* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Rule Of Law; Consensus Orientation; Equality; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia telah maju dalam berbagai perspektif, salah satunya kemajuan public turn of events. Perbaikan di segala bidang berkembang dengan cepat. Otoritas publik berusaha untuk mencapai kemajuan yang berbeda yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan “prioritas penggunaan BLT dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa”. Kebutuhan aset desa pada tahun 2020 difokuskan pada bantuan uang langsung bagi individu yang terkena Covid- 19.

Mekanisme penyaluran BLT dana desa berdasarkan peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu “di antaranya pertama, untuk desa yang menerima dana desa sebesar Rp 800.000.000, alokasi BLT maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa”. Dalam proses pelaksanaan pelepasan BLT, pelepasan tidak langsung dan tumpang tindih, dan diyakini masyarakat tidak lagi memiliki pandangan positif terhadap rencana BLT (Verda Nano, 2020) Adapun, berdasarkan hasil riset analisis yang diterbitkan *Institute for development of economics and finance* (INDEF) ditemui “pada 7 April 2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Pokok utama perbincangan adalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran”. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan penyaluran bantuan dengan tepat sasaran yang merupakan kuncinya, sehingga kelompok rawan pandemi covid-19 dapat menerima bantuan secara penuh. Dalam hal ini, aplikasinya sangat penting *Rule Of Law*, *Consensus Orientation*, dan *Equality*, meningkatkan kesejahteraan sosial secara adil. Selama pandemi, BLT harus mengutamakan penggalangan dana untuk pelaksanaan program lintas kegiatan, penciptaan yang berkelanjutan lapangan kerja dan pendapatan keluarga meningkat. Penggunaan aset desa pada tahun 2020 akan memberikan keuntungan terbesar. supaya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di desa Totokaton Kecamatan Punggur salah satunya. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk bersikap adil tanpa pandang bulu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat karena orang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima manfaat.

KAJIAN LITERATUR

Good Governance

World Bank mendefinisikan governance sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Secara umum good governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik seringkali dianggap sebagai pemimpin yang baik, dan merupakan penghubung antara tata pemerintahan yang baik dan kualitas aparatur pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam rangka memberikan pelayanan publik diperlukan kemampuan profesional dan etis untuk meningkatkan tanggung jawab atas kinerja peralatan (Ali, 2007).

Rule Of Law

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP) rule of law* merupakan prinsip hukum yang mulai muncul pada abad kesembilan belas dengan diperkenalkannya hukum dan ketertiban serta kerangka aturan mayoritas.

Consensus Orientation

Menurut UNDP (*United Nations Development Programs*) orientasi konsensus adalah standar administrasi pemerintahan yang baik, dinyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan atau mencari keadaan menjanjikan yang berguna untuk mendukung semua.

Equality

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan : "Asas Keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban."

Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang "pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM".

Kesejahteraan Masyarakat

Soetomo (2014 : 47) menyimpulkan "kesejahteraan adalah kondisi dari unsur atau kondisi yang mengandung unsur ketertiban dan keamanan, keadilan, kedamaian, kemakmuran dan kehidupan tidak hanya memiliki arti menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga berkeadilan arti luas dari semua aspek masyarakat dan masyarakat adalah suatu kondisi dimana kondisi kehidupan masyarakat dapat dilihat dari taraf hidup masyarakat".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan informasi kuantitatif, informasi kuantitatif adalah informasi berupa angka atau informasi subjektif yang diubah menjadi angka (Sugiyono, 2014: 13). Informasi kuantitatif dalam investigasi ini merupakan konsekuensi yang ditangani dari survei yang disebar oleh spesialis kepada pemerintah desa dan jaringan di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur.

Instrumen ujian yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah survey atau kuesioner. Kuesioner, secara khusus memberikan ikhtisar pertanyaan kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa jawaban efektif. Ukuran keragaman informasi ini dilengkapi daftar pertanyaan dan artikulasi yang selanjutnya diberikan kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari beberapa buku harian dan buku logis yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para ilmuwan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Totokaton dibuka pada tahun 1954 oleh direktorat imigrasi di Kementerian Transkopedia (Koperasi Transmigrasi dan Bina Desa). Sebelum dibuka, kawasan ini merupakan kawasan liar yang dimiliki oleh penduduk yang terdiri dari beberapa perkumpulan kecil-kecilan yang biasa dikenal dengan umbulan. Misalnya umbulan krui, umbulan kejawen, umbulan Irian I, umbulan Irian II. Penduduk yang berasal dari sekitar kawasan hutan yang dimaksud datang berusaha menebang hutan untuk melakukan pembangunan. Kemudian datang populasi imigrasi lain dari luar negeri (Nouvelle Calédonie) berjumlah 247 keluarga atau 641 individu. Sebelum mereka ditempatkan di bagian terpisah, mereka harus diwajibkan di rumah krisis (tempat tidur tinggi). Pada saat itu para pendatang dipindahkan ke rumah-rumah yang telah diberikan oleh Biro Transmigrasi, dimana setiap kerabat mendapat 1 (satu) rumah, tanah 0,25 ha, tanah yang dikembangkan 0,75 ha, sawah yang akan datang 1 ha, peralatan pedesaan dan kebutuhan pokok, makanan, untuk satu tahun.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 1. Uji normalitas hasil output olah data pada spss 20 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,74522658
Most Extreme Differences	Absolute	,131
	Positive	,074
	Negative	-,131
Kolmogorov-Smirnov Z		1,017
Asymp. Sig. (2-tailed)		,252

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian normalitas dengan teknik Kolmogrov-Smirnov terhadap model regresi lurus antara hukum dan ketertiban, arah kesepakatan dan keseragaman kesejahteraan masyarakat daerah diperoleh nilai 0.252 yang artinya lebih dari 0.05. Jadi sisa-sisa mengikuti penyebaran yang khas dan kecurigaan tentang biasa terpenuhi, cenderung disimpulkan bahwa informasi disampaikan secara teratur dan masuk akal untuk penelitian.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Uji multikolinearitas hasil output olah data pada spss 20

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,811	8,106		1,950	,056		
Rule OfLaw	,469	,127	,444	3,698	,000	,991	1,009
Consensus Orientation	,054	,100	,065	,538	,593	,968	1,033
Equality	,067	,110	,074	,607	,547	,971	1,030

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa estimasi VIF untuk variabel rule of law sebesar 1.009, consensus orientation 1.033, dan equality 1.030. Nilainya mutiple dan di bawah 10, sedangkan nilai hambatan dalam variabel rule of law adalah 0,991, consensus orientation 0,968, dan equality 0,971, sehingga estimasi variabel lebih dari 10%. Hal ini cenderung dianggap bahwa dalam model regresi ini tidak ada hubungan antara faktor-faktor bebas.

Uji Linearitas

Tabel 3. Uji linearitas variabel *rule ofLaw* (X₁) hasil output olah data pada spss 20

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat Rule Of Law	Between * Groups	(Combined)	69,967	7	9,995	3,361	,005
		Linearity	42,388	1	42,388	14,254	,000
		Deviationfrom Linearity	27,579	6	4,596	1,546	,182
Within Groups			154,633	52	2,974		
Total			224,600	59			

Dilihat dari tabel uji linieritas variabel X₁ diketahui bahwa deviasi Sig dari harga linieritas adalah 0,182 > 0,05. Jadi sangat mungkin beralasan bahwa ada hubungan langsung antara variabel rule of law dengan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Uji linearitas variabel *consensus orientation* (X₂) hasil output olah data pada spss 20

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat * Consensus Orientation	Between * Groups	(Combined)	27,700	11	2,518	,614	,808
		Linearity	,377	1	,377	,092	,763
		Deviation from Linearity	27,323	10	2,732	,666	,750
Within Groups			196,900	48	4,102		
Total			224,600	59			

Dilihat dari tabel uji linieritas untuk variabel X₂ diketahui bahwa deviasi Sig dari harga linieritas adalah 0,750 > 0,05. Sehingga cenderung disimpulkan bahwa ada hubungan langsung antara consensus orientation dengan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Uji linearitas variabel *equality* (X₃) hasil output olah data pada spss 20

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kesejahteraan Masyarakat Equality	Between * Groups	(Combined)	43,960	12	3,663	,953	,505
		Linearity	,797	1	,797	,207	,651

Deviation from Linearity	43,162	11	3,924	1,021	,444
Within Groups	180,640	47	3,843		
Total	224,600	59			

Berdasarkan tabel uji linieritas untuk variabel X3 diketahui bahwa deviasi Sig dari harga linieritas adalah $0,444 > 0,05$. Jadi sangat mungkin beralasan bahwa ada hubungan langsung antara variabel equality dan kesejahteraan masyarakat.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji heteroskedastisitas hasil output olah data pada spss 20

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15,420	4,713		-3,272	,002
Rule Of Law	,323	,074	,498	4,371	,000
Consensus Orientation	-,033	,058	-,065	-,564	,575
Equality	,103	,064	,185	1,610	,113

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas diatas diketahui bahwa nilai sig dari variabel rule of law sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pada persamaan variabel ini mengandung heteroskedastitas. Pada variabel consensus orientation dan equality dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,575 pada consensus orientation dan 0,113 pada equality. Maka disimpulkan bahwa pada persamaan variabel consensus orientation dan equality tidak mengandung heteroskedastitas.

Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Analisis regresi berganda hasil output olah data pada spss 20

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	15,811	8,106	
Rule Of Law 1	0,469	0,127	0,444
Consensus Orientation	0,054	0,1	0,065
Equality	0,067	0,11	0,074

Uji T (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel di atas, persamaan yang diperoleh: $Y = \theta + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$

Y= 15,811+ 0,469X1 + 0,054X2 + 0,067X3 + e

Ghozali (2012:98) menyimpulkan “uji t faktual pada intinya menunjukkan sejauh mana pengaruh satu faktor bebas secara independen dalam memperjelas variabel reliabel. Uji t digunakan untuk menguji sebagian pengaruh dari setiap faktor bebas yang digunakan dalam pengujian ini”.

Tabel 8. Uji statistik T hasil output olah data pada spss 20

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,811	8,106		1,950	,056
Rule OfLaw	,469	,127	,444	3,698	,000
Consensus Orientation	,054	,100	,065	,538	,593
Equality	,067	,110	,074	,607	,547

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Dari tabel diatas serta perhitungan rumus untuk mencari t tabel, dapat disimpulkan sebagai berikut :

H₁ : Diketahui bahwa sig insentif dampak X1 (rule of law) terhadap Y (kesejahteraan masyarakat) adalah 0,000 <0,05 dan t hitung 3,608 > 2,00. Jadi sangat mungkin beralasan bahwa H1 diakui yang menyiratkan bahwa ia dapat mempengaruhi X1 pada Y.

H₂ : Disadari bahwa sig an insentif dampak X2 (consensus orientation) terhadap Y (kesejahteraan masyarakat) adalah 0,593 > 0,05 dan t hitung 0,538 <2,00. Jadi sangat mungkin beralasan bahwa H2 dihilangkan, yang menyiratkan bahwa tidak ada dampak X2 pada Y.

H₃ : Disadari bahwa sig an insentif dampak X3 (equality) terhadap Y (kesejahteraan masyarakat) adalah 0,547 > 0,05 dan t cek 0,607 <2,00. Jadi sangat mungkin beralasan bahwa H3 diberhentikan, yang

menyiratkan bahwa tidak ada dampak X3 pada Y

Uji F (Simultan)

Uji F atau uji koefisien sekaligus untuk menentukan pengaruh variabel rule of law, consensus orientation, dan equality terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir dari konsekuensi uji F didasarkan, jika kemungkinan atau kepentingan <0,05 atau f hitung> f tabel menyiratkan bahwa teori tersebut didemonstrasikan.

Tabel 9. Uji statistik F hasil output olah data pada spss 20

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,897	3	14,966	4,664	,006 ^b
	Residual	179,703	56	3,209		
	Total	224,600	59			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Equality, Rule Of Law, ConsensusOrientation

Dari tabel uji faktual di atas dan konsekuensi dari tabel f, dapat ditarik tujuan sebagai berikut:

H4: Berdasarkan output di atas, disadari bahwa estimasi kepentingan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah 0,006 <0,05 dan harga yang ditentukan adalah 4,664> f tabel 2,77. Jadi sangat baik dapat disimpulkan bahwa H4 diakui, yang menyiratkan bahwa terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 pada saat yang sama pada Y.

Pembahasan

Pengaruh *Rule Of Law* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi *Covid-19*. Akibat dari uji spekulasi atau uji t yang telah dilakukan untuk menentukan rule of law terhadap kesejahteraan masyarakat, diperoleh hasil bahwa variabel rule of law memiliki nilai estimasi yang sangat besar yaitu 0,000 artinya <0,05. Sehingga sebagian variabel hukum dan ketertiban mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat.

Jadi spekulasi dan H1 diakui, hal ini menunjukkan semakin baik ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah desa maka derajat kesejahteraan masyarakat daerah setempat selama pandemi Covid-19 akan semakin tinggi dan semakin terjaga. Hal ini diperkuat oleh penelitian Safitri (2018) yang berjudul "Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan good governance". Konsekuensi dari penyelidikan ini adalah pemanfaatan hukum dan ketertiban berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Sebab, dalam penyelidikan ini standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti kepentingan, hukum dan ketertiban, keterusterangan, arah kesepakatan, nilai, kelangsungan dan efektivitas, tanggung jawab, dan visi vital telah dilaksanakan secara tepat dan akurat oleh DPRD Desa Sardonoharjo.

Pengaruh *Consensus Orientation* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi *Covid-19*. Konsekuensi dari penelitian ini tidak mendukung teori, khususnya ada dampak arahan kesepakatan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah setempat selama pandemi Covid-19. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa H2 diberhentikan, yang mengimplikasikan bahwa consensus orientation tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid19. Hasil penelitian ini meniadakan penelitian Apiriliana (2017) yang menyatakan bahwa arah kesepakatan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah setempat, dengan alasan bahwa Pemprov DKI memiliki makna yang sama dengan gagasan daerah setempat sehubungan dengan proyek yang akan dilaksanakan bagi masyarakat. kesejahteraan masyarakat daerah setempat.

Pengaruh *Equality* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19. Konsekuensi dari investigasi ini tidak mendukung teori, secara spesifik ada dampak equality terhadap kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa H3 diberhentikan, yang menyiratkan bahwa equality tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat selama

pandemi COVID-19. Konsekuensi dari penelitian ini menyangkal penelitian Rustriarini (2016) yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di wilayah Bali telah melaksanakan pemerintahan yang baik sebagaimana dibentuk oleh daerah setempat. Terlebih lagi, dengan adanya keseimbangan ini berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah setempat, namun dalam penyelidikan ini ditemukan bahwa kekurangannya adalah penataan dan perencanaan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat sehingga memungkinkan untuk dijadikan pembangunan. kemajuan tidak efektif, cakup dan terjangkau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *rule of law*, *consensus orientation* dan *equality* terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa dapat disimpulkan. *Rule of law* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa. *Consensus orientation* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa. *Equality* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa. Secara bersama-sama variabel *rule of law*, *consensus orientation*, dan *equality* berpengaruh positif secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa.

DAFTAR LITERATUR

- Ali, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang asas keadilan.
- Permendesa PDTT. Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan BLT
- Rustiarini. N.W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, *Simposium Nasional Akuntansi*. **19**. 1 – 18.
- Safitri. T.A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Litbang Sukowati*. 02. 89 – 105.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance Pemerintahan Yang Baik*. Bandung : MandarMaju.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan Upaya Mewujudkan Dalam Persepektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang – undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang – Undang. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zahroh, A.K. (2018). Perbandingan Konsep Rule Of Law Sustainable Development Gols (Sdgs) poin 16 dan konsep Nomokrasi Islam. *Skripsi*. Jakarta. Universitas Islam Indonesia.